

**DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT (AS)-DENMARK  
PASCAKETERTARIKAN AS TERHADAP PEMBELIAN  
GREENLAND, 2019–2021**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. TEGAR ARIAJOJA**

**NPM 2216071036**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT (AS)-DENMARK PASCAKETERTARIKAN AS TERHADAP PEMBELIAN GREENLAND, 2019–2021

Oleh

**M. TEGAR ARIAYOJA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan Amerika Serikat (AS)–Denmark pascaketertarikan AS terhadap pembelian Greenland pada periode 2019–2021. Ketertarikan tersebut memicu ketegangan diplomatik sekaligus menandai kembalinya Greenland sebagai wilayah strategis dalam geopolitik Arktik di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar serta dampak perubahan iklim yang membuka jalur pelayaran dan potensi sumber daya alam baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa literatur akademik, dokumen resmi, laporan kebijakan, dan sumber kredibel lainnya. Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan konsep soft power untuk menjelaskan penggunaan instrumen non-militer oleh AS, seperti diplomasi ekonomi dan budaya, serta teori securitization untuk menganalisis konstruksi Greenland sebagai isu keamanan oleh AS dan respons counter-securitization dari Denmark dan pemerintah otonom Greenland.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketertarikan AS terhadap pembelian Greenland tidak hanya berdampak pada ketegangan diplomatik jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan pola hubungan bilateral AS–Denmark yang lebih kompleks, di mana isu kedaulatan, identitas nasional Greenland, dan kepentingan keamanan Arktik menjadi variabel utama. Denmark dihadapkan pada dilema antara mempertahankan kedaulatan wilayahnya dan menjaga hubungan strategis dengan AS sebagai sekutu NATO, sementara Greenland semakin menegaskan peran sebagai aktor semi-otonom dalam politik internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa periode 2019–2021 merupakan fase penting yang menunjukkan pergeseran strategi AS dari pendekatan militer ke non-militer dalam persaingan geopolitik Arktik, sekaligus memperlihatkan bagaimana interaksi antara kepentingan keamanan, ekonomi, dan identitas membentuk dinamika hubungan AS–Denmark.

**Kata Kunci: Amerika Serikat, Denmark, Greenland, Hubungan, Arktik, Keamanan, Otonom**

**ABSTRACT****DYNAMICS OF UNITED STATES–DENMARK RELATIONS  
AFTER THE U.S. INTEREST IN PURCHASING  
GREENLAND, 2019–2021****By****M. TEGAR ARIAYOJA**

This study aims to analyze the dynamics of United States (US)–Denmark relations following US interest in purchasing Greenland during the 2019–2021 period. This interest triggered diplomatic tensions while also marking Greenland’s renewed strategic in Arctic geopolitics amid intensifying great power rivalry and the impacts of climate change, which have opened new shipping routes and access to natural resources. This research employs a descriptive qualitative approach using secondary data, including academic literature, official documents, policy reports, and other credible sources. Conceptually, the study integrates concept of soft power to explain the use of non-military instruments by the US, such as economic and cultural diplomacy, as well as securitization theory to analyze the construction of Greenland as security issue by the US and the counter-securitization response from Denmark and autonomous Government of Greenland.

The findings indicate that the US interest in purchasing Greenland not only generated short-term diplomatic tensions but also reshaped the pattern US–Denmark bilateral relations into a more complex, which issues of sovereignty, Greenlandic national identity, and Arctic security interests became key variables. Denmark faced a dilemma between maintaining its territorial sovereignty and preserving strategic relations with US as a NATO ally, while Greenland increasingly asserted its role as a semi-autonomous actor in international politics. This study concludes that 2019–2021 period represents a critical phase demonstrating a shift US strategy from military to non-military approaches in Arctic geopolitical competition, while highlighting how the interaction of security, economic, and identity interest shapes dynamics of US–Denmark relations.

**Keywords: United States, Denmark, Greenland, Relation, Arctic, Security, Autonomy.**

**DINAMIKA HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT (AS)-DENMARK  
PASCAKETERTARIKAN AS TERHADAP PEMBELIAN  
GREENLAND, 2019–2021**

Oleh

**M. TEGAR ARIAYOJA**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul Skripsi** : **DINAMIKA HUBUNGAN  
AMERIKA SERIKAT (AS)-DENMARK  
PASCAKETERTARIKAN AS TERHADAP  
PEMBELIAN GREENLAND, 2019-2021**

**Nama mahasiswa** : **M. Tegar Ariayoja**

**Nomor Pokok Mahasiswa** : **2216071036**

**Program Studi** : **Hubungan Internasional**

**Fakultas** : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Pembimbing Utama**

**Ketua Jurusan**

**Hubungan Internasional**

**Iwan Sulisty, S. Sos., M.A.**  
**NIP. 198604282015041004**

**Simon Sumanjyo H, S. A.N., M. PA.**  
**198106282005011003**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**: Iwan Sulisty, S. Sos., M.A.** .....



**Penguji**

**: Hasbi Sidik, S. IP., M.A.** .....

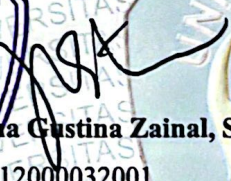


**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.**

**NIP. 197608212000032001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Maret 2026**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



M. Tegar Ariyoja  
NPM. 2216071036

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Yukum Jaya, Lampung Tengah pada tanggal 23 Mei 2003, merupakan anak kedia putra dari Bapak Hendra Wijaya dan Ibu Ervina Hikmawati. Penulis menyelesaikan pendidikan pertamanya di TK Aba Yukum Jaya. Lalu tahun 2010-2016, penulis melanjutkan sekolah dasar di SD IT Bustanul Ulum Terbanggi Besar. Lalu pada tahun 2019, Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP IT Smart Insani Lampung Tengah, dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA IT Smart Insani Lampung Tengah pada tahun 2021 dengan konsentrasi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan sarjana di perguruan tinggi Universitas Lampung dengan mengambil Jurusan Hubungan Internasional.

## MOTTO

“We’ve all got both light and dark inside us. What matters is the part that we choose to act on.”

– Sirius Black

“We’re all human, aren’t we? Every human life is worth the same, and worth saving.”

– Kingsley Shacklebolt

“Tak ada yang bisa memukul sekeras hidup. Tapi yang penting bukan seberapa keras kau bisa memukul, melainkan seberapa keras kau bisa dipukul dan tetap maju.”

– Rocky Balboa

## SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dinamika Hubungan Amerika Serikat (AS)–Denmark Pascaketertarikan AS terhadap Pembelian Greenland pada periode 2019–2021.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sekaligus menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa, serta dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu penulis dalam menghadapi tantangan selama proses penelitian dan penulisan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan arahan, serta berbagi pengalaman, baik secara akademik maupun praktis, selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Bapak Hasbi Sidik, S. IP ., M.A. selaku Dosen Penguji, yang memberikan banyak kritik dan saran yang membangun dan mudah dipahami, selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
6. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP, M.Si., M.B.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan, arahan, serta pendampingan

kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.

7. Seluruh dosen dan Staff Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang dengan tulus membagi ilmu, meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, serta memberikan berbagai bentuk dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu tercinta Ervina Hikmawati atas kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, kesabaran, serta perhatian yang begitu besar dalam setiap tahap kehidupan penulis. Ibu adalah sumber kekuatan, tempat bersandar, sekaligus motivasi terbesar yang selalu menguatkan penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap dukungan, pelukan, dan nasihat yang diberikan menjadi penenang di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Tanpa cinta dan keikhlasan Ibu, perjalanan ini tidak akan mampu penulis lalui dengan baik. Semoga segala pengorbanan dan ketulusan Ibu dibalas dengan kebahagiaan, kesehatan, serta keberkahan yang melimpah.

9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah tercinta Hendra Wijaya atas segala pengorbanan, kerja keras, ketulusan, serta tanggung jawab yang telah diberikan tanpa kenal lelah. Ayah senantiasa menjadi sosok panutan yang mengajarkan arti keteguhan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Dukungan moral, nasihat, serta doa yang selalu Ayah panjatkan menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah, bahkan di saat-saat sulit selama proses penyusunan skripsi ini. Tanpa perjuangan dan kepercayaan yang Ayah berikan, penulis tidak akan mampu mencapai titik ini. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan Ayah senantiasa mendapatkan balasan yang berlipat ganda serta kebahagiaan dan kesehatan yang selalu menyertai.

10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak dan Adik tercinta atas segala doa, dukungan, perhatian, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran Kakak sebagai sosok yang memberi motivasi, nasihat, dan teladan, serta keceriaan Adik yang senantiasa menguatkan, menjadi sumber energi tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan

yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan. Semoga kebersamaan, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan dapat terus terjalin serta menjadi penyemangat bagi penulis untuk melangkah menuju tahap kehidupan selanjutnya.

11. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Calista Arvi Patricia, yang senantiasa hadir sebagai sumber dukungan, semangat, dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta doa yang tidak pernah putus, bahkan di saat-saat penuh tekanan dan kelelahan. Kehadiranmu menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan tidak pernah benar-benar dilalui sendirian. Dukungan moral dan emosional yang kamu berikan telah menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus melangkah hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan berbalik menjadi kebahagiaan dan kesuksesan untukmu.

12. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang tergabung dalam grup Nusantara Internasional atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi tempat berbagi ilmu dan pengalaman, tetapi juga menjadi sumber semangat dan penguat di saat menghadapi berbagai tantangan. Canda, tawa, serta solidaritas yang terjalin telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik penulis. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun dapat terus terjaga dan membawa kesuksesan bagi kita semua di masa depan.

13. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Geh Production Wedding Organizer yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, serta dukungan kepada penulis untuk terlibat dan memperoleh pengalaman kerja yang sangat berharga. Kesempatan tersebut tidak hanya memberikan pembelajaran dan keterampilan baru, tetapi juga membantu penulis dalam memperoleh pemasukan untuk menunjang kebutuhan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Semoga Geh Production Wedding Organizer semakin berkembang dan sukses dalam memberikan pelayanan terbaik di bidangnya.

14. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bibi tercinta atas segala perhatian, kasih sayang, doa, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Kepedulian dan bantuan yang diberikan, baik secara moral maupun material, menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan. Semoga segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda serta kebahagiaan dan kesehatan yang senantiasa menyertai.

15. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berproses, belajar, dan bertahan melewati berbagai dinamika selama perjalanan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Tidak mudah menghadapi rasa lelah, keraguan, kegagalan, serta tekanan yang datang silih berganti, namun diri ini memilih untuk tetap bangkit dan melanjutkan langkah. Terima kasih karena tidak menyerah, karena terus berusaha meskipun dalam keterbatasan, dan karena berani percaya bahwa setiap proses memiliki makna. Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan pengingat bahwa diri ini mampu melewati hal-hal yang sebelumnya terasa mustahil. Semoga ke depan, diri ini tetap rendah hati dalam keberhasilan dan kuat dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan.

16. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Andri Aggasy selaku sahabat yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya dalam mengajarkan penggunaan tools pada Microsoft Word serta berbagai pengaturan dan format penulisan yang sangat membantu penulis dalam merapikan dan menyelesaikan naskah skripsi ini. Dukungan, kesabaran, dan kesediaan waktu yang diberikan menjadi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

17. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan grup pendaki gunung yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan dukungan dalam pemaparan seminar serta selama proses bimbingan skripsi ini. Kehadiran, semangat, dan doa yang diberikan menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan penelitian ini

dengan sebaik-baiknya. Kebersamaan dan dukungan yang tulus tersebut merupakan hal yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis.

18. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sepupu tercinta, Ilham Azwansyah, atas dukungan, perhatian, dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi penguat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Bandar Lampung, 13 April 2026  
Penulis,

M. Tegar Ariayoja  
NPM. 2216071036

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Konseptual .....	17
2.2.1. Konsep Kedaulatan .....	18
2.2.2 Teori Soft Power .....	20
2.2.3 Teori Securitization.....	23
2.3 Kerangka Berpikir.....	27
<b>III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian .....	30
3.3 Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data.....	33
<b>IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum Dinamika Hubungan AS-Denmark Pasca-2019.....	35
4.1.1 Greenland Sebagai Pivot Territory dalam Geopolitik Arktik Kontemporer .....	41

4.1.2 Greenland Sebagai Aktor Semi-Otonom dalam Politik Arktik.....	43
4.2 Strategi Rencana Pembelian AS terhadap Greenland .....	46
4.2.1 Peran Tiongkok di Arktik Sebagai Faktor Penguat Securitization AS ....	48
4.2.2 Peran Rusia di Arktik Sebagai Faktor Penguat Securitization AS.....	53
4.3 Respon AS terhadap Ekspansi Tiongkok-Rusia .....	56
4.3.1 Securitization Arktik Transformasi Isu Lingkungan Menjadi Keamanan	57
4.4 Dampak Ketertarikan AS Terhadap Hubungan Bilateral Dengan Denmark ..	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
5.1 Kesimpulan .....	69
5.2 Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 4.1 Data Bantuan Dana AS ke Greenland, Periode 2019-2021 .....	39
Tabel 4.2.1 Perbandingan Cadangan Logam Tanah Jarang Greenland .....	50
Tabel 4.3.1 Data Penurunan Cakupan Es Laut Arktik.....	58

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian .....	27
Gambar 4.1.2 Peta Arktik dan Jalur Perdagangan Strategis .....	54
Gambar 4.3.1 Estimasi Perubahan Jalur Strategis Arktik di Masa Depan.....	59

## DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
BBC	: British Broadcasting Corporation
CIV	: Collective Imagined Value
EU	: European Union
GPR	: Global Perception and Recognition
HMS	: Historical Memory System
ICC	: Inuit Circumpolar Council
NATO :	North Atlantic Treaty Organization
NSC	: National Symbolic Capital
SMV	: Speech Act / Security-related Measurement Value
SED	: Socio-Economic Development
SPC	: Shared Political Culture
NSR	: Northern Sea Route
BRI	: Belt and Road Initiative
CRS	: Congressional Research Service
EPRS	: European Parliamentary Research Service
ICE Pact	: Icebreaker Collaboration Effort Pact
ISR	: Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance
OIES	: Oxford Institute for Energy Studies
OSD	: Office of the Secretary of Defense
PDB	: Produk Domestik Bruto
RCI	: Radio Canada International
SDA	: Sumber Daya Alam
REE	: Rare Earth Elements (Logam Tanah Jarang)
NOAA	: National Oceanic and Atmospheric Administration

DoD : Department of Defense  
DoS : Department of State

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Skripsi ini mendeskripsikan dinamika hubungan Amerika Serikat (AS)–Denmark pascaketertarikan pembelian Greenland oleh AS, periode 2019–2021. Latar belakang kajian berangkat dari keterlibatan historis AS di Greenland sejak era Perang Dingin, munculnya kembali wacana pembelian wilayah tersebut pada masa pemerintahan Donald Trump, serta meningkatnya rivalitas kekuatan besar di Arktik akibat perubahan iklim dan terbukanya jalur pelayaran baru. Secara konseptual, penelitian ini menggunakan pendekatan soft power untuk mengidentifikasi instrumen diplomasi ekonomi, promosi budaya, dan politik identitas yang dijalankan AS, serta securitization theory untuk menjelaskan konstruksi isu Greenland sebagai persoalan keamanan dan respons counter-securitization dari Denmark maupun pemerintah otonom Greenland. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam memahami dinamika hubungan bilateral AS–Denmark, sekaligus memperkaya kajian geopolitik Arktik dalam disiplin Hubungan Internasional.

### **1.1 Latar Belakang**

Minat Amerika Serikat terhadap Greenland bukanlah fenomena baru, melainkan bagian dari dinamika geopolitik yang telah berlangsung sejak pertengahan abad ke-20. Pada masa awal Perang Dingin, kepentingan strategis terhadap Greenland terlihat jelas ketika Presiden Harry S. Truman pada tahun 1946 menawarkan kepada Denmark pembelian wilayah tersebut dengan harga 100 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk emas. Tawaran ini ditolak, namun Denmark

tetap memberikan akses kepada Amerika Serikat untuk membangun pangkalan militer di Thule pada tahun 1951 (Marc. J, 2023). Pangkalan ini kemudian menjadi salah satu titik terpenting dalam jaringan sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat, sekaligus memainkan peran dalam proyek-proyek rahasia militer seperti *Project Iceworm*. Kejadian tersebut menandai awal keterlibatan Amerika Serikat secara mendalam dalam politik, keamanan, dan ekonomi di Greenland, sekaligus memperlihatkan bagaimana kawasan Arktik dipandang vital bagi kepentingan strategis Amerika Serikat dan aliansi militernya dalam kerangka NATO (Jacobsen et al., 2024).

Proposal Donald Trump pada tahun 2019 untuk membeli Greenland dari Denmark dinilai tidak relevan dengan kondisi kontemporer karena menghidupkan kembali praktik jual-beli wilayah yang lazim terjadi pada era kolonial. Contoh historis seperti Louisiana Purchase (1803), Alaska Purchase (1867), dan pembelian Danish West Indies (1917) menunjukkan bahwa pada masa itu wilayah tanpa pemerintahan mandiri sah dianggap sebagai objek transaksi antarnegara. Namun, dalam konteks hubungan internasional kontemporer, prinsip kedaulatan negara dan hak penentuan nasib sendiri telah menjadi norma fundamental yang mengatur status politik suatu wilayah. Oleh karena itu, gagasan Trump tidak hanya dipandang usang secara historis, tetapi juga bertentangan dengan kerangka hukum internasional modern yang tidak lagi memperlakukan wilayah sebagai komoditas untuk diperjualbelikan oleh kekuatan besar (Mabbett, 2025).

Berdasarkan sejarah Amerika Serikat melakukan Tindakan yang serupa dengan membeli Louisiana pada tahun 1803, Amerika Serikat berkembang dari negara kecil di pesisir Atlantik menjadi kekuatan kontinental. Dalam perjanjian yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte dengan Prancis, Amerika Serikat memperoleh wilayah seluas sekitar 828.000 mil persegi dengan harga 15 juta dolar. Akuisisi ini melipatgandakan wilayah negara dan memberikan kontrol strategis atas Sungai Mississippi dan pelabuhan New Orleans, yang menjadi jalur utama perdagangan agraris ke wilayah pedalaman. Menurut para sejarawan, Presiden Thomas Jefferson didorong oleh keinginan untuk menjamin akses ekonomi bagi para petani di wilayah barat dan kekhawatiran tentang potensi ancaman Prancis di Amerika Utara (Patrick, 2007). Secara geopolitik, Pembelian Louisiana menghilangkan kehadiran

kekuatan kolonial yang signifikan di pusat benua Amerika dan membuka jalan bagi ekspansi ke arah Pasifik, yang kemudian dilegitimasi oleh ideologi Manifest Destiny. Sebuah studi dalam *Journal of American History* menyatakan bahwa pembelian ini merupakan titik balik yang memungkinkan Amerika Serikat memperkuat kekuatan militer, ekonomi, dan demografisnya secara bersamaan. Di sisi lain, studi klasik dalam *Journal of Education* menyatakan bahwa keputusan tersebut dianggap sebagai tindakan berani yang membentuk identitas nasional Amerika Serikat (Patrick, 2007).

*Purchase of Alaska* dari Kekaisaran Rusia pada tahun 1867 menunjukkan pola ekspansi melalui pembelian wilayah kembali. Konsekuensi dari perundingan yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri William H. Seward adalah kesepakatan untuk membeli Alaska seharga 7,2 juta dolar AS. Keputusan ini pada awalnya ditertawakan oleh masyarakat umum dan disebut sebagai "Seward's Folly" karena wilayah tersebut dianggap terpencil dan tidak produktif (Janice, 2023). Namun, akuisisi Alaska memiliki nilai strategis yang signifikan dari sudut pandang geopolitik jangka panjang. Pertama, pembelian ini memperkuat posisi Amerika Serikat dalam persaingan kekuatan di Amerika Utara karena mencegah Inggris mengembangkan wilayahnya dari Kanada ke Pasifik Utara. Kedua, sumber daya alam Alaska, termasuk gas alam, minyak bumi, emas, dan perikanan, telah terbukti sangat berkontribusi pada ekonomi negara (Janice, 2023).

Ketiga, Alaska dekat dengan Asia dan berbatasan dengan Arktik menjadikannya lokasi strategis penting untuk pengawasan militer dan pengawasan internasional, terutama selama Perang Dingin. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal *Diplomatic History*, pembelian Alaska juga mencerminkan orientasi Amerika Serikat sebagai kekuatan maritim dan Arktik yang meningkat, yang memungkinkan negara tersebut memperluas jangkauan pertahanan ke wilayah utara dan Pasifik. Oleh karena itu, pembelian Alaska bukan sekadar transaksi ekonomi itu adalah investasi strategis yang memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan global yang sedang berkembang (Janice, 2023).

Strategi ekspansi non-militer ini mencapai bentuk yang lebih berorientasi pada keamanan dalam pembelian Danish West Indies dari Denmark pada tahun 1917,

yang kini dikenal sebagai Kepulauan Virgin Amerika Serikat. Berbeda dengan Louisiana dan Alaska yang berfokus pada ekspansi daratan dan sumber daya, pembelian ini didorong oleh pertimbangan militer dan kontrol jalur laut pada masa Perang Dunia I. Amerika Serikat khawatir bahwa pulau-pulau tersebut dapat jatuh ke tangan Jerman dan digunakan sebagai pangkalan angkatan laut yang mengancam Terusan Panama serta jalur perdagangan Karibia. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat membayar 25 juta dolar AS kepada Denmark untuk memperoleh kedaulatan atas wilayah tersebut. Kajian dalam *American Journal of International Law* menekankan bahwa transaksi ini merupakan contoh ekspansi teritorial yang dilakukan melalui mekanisme hukum internasional dan persetujuan bilateral, sehingga berbeda dari praktik kolonialisme tradisional. Sementara itu, penelitian dalam *American Historical Review* menunjukkan bahwa rencana pembelian sebenarnya telah dipertimbangkan sejak abad ke-19, tetapi baru terealisasi ketika faktor keamanan global menjadikannya kebutuhan strategis mendesak (James, 2017). Secara geostrategis, kepemilikan pulau-pulau tersebut memungkinkan Amerika Serikat memperkuat dominasi maritim di Karibia dan melindungi kepentingannya di belahan barat, sejalan dengan Doktrin Monroe yang menolak campur tangan kekuatan Eropa di kawasan tersebut (James, 2017).

Selain itu, ketiga pembelian wilayah ini menunjukkan pergeseran tujuan ekspansi Amerika Serikat, yang beralih dari fokus ekonomi dan agraria ke fokus keamanan dan dominasi global. Pembelian Denmark West Indies menunjukkan keamanan maritim dan perlindungan jalur perdagangan internasional, sementara pembelian Louisiana menunjukkan kebutuhan negara yang sedang berkembang akan ruang hidup dan akses perdagangan; pembelian Alaska menunjukkan persaingan kekuatan besar dan pencarian sumber daya strategis. Ketiganya memiliki kesamaan: mereka menggunakan diplomasi dan transaksi ekonomi sebagai alat ekspansi, yang memungkinkan Amerika Serikat memperluas wilayahnya tanpa terlibat dalam konflik bersenjata langsung. Menurut para ilmuwan hubungan internasional, gaya ini merupakan jenis "imperialisme informal", di mana kekuatan diperluas melalui perjanjian ekonomi dan kekuatan politik daripada pendudukan militer. Selain itu, pencapaian pembelian wilayah ini meningkatkan kredibilitas Amerika Serikat sebagai pihak yang bijaksana yang

mampu memanfaatkan peluang geopolitik melalui negosiasi yang terencana (James, 2017).

Isu serupa muncul kembali lebih dari tujuh puluh tahun kemudian. Presiden Donald Trump menyatakan minat untuk membeli Greenland pada Agustus 2019, mengejutkan dunia. Tidak seperti Truman, yang menekankan alasan militer, Trump menggunakan pendekatan ekonomi, politik, dan budaya untuk membingkai tujuan tersebut. Strategi ketertarikan Amerika Serikat untuk melakukan pembelian Greenland lebih menekankan instrumen nonmiliter, menurut rencana yang sempat dikabarkan, yang mencakup memberikan insentif ekonomi kepada penduduk Greenland, melakukan diplomasi budaya menggunakan bahasa Kalaallisut, dan mencoba memperluas kerja sama infrastruktur. Langkah ini didorong oleh peningkatan jalur pelayaran baru yang muncul sebagai akibat dari pencairan es di Arktik, nilai strategis Greenland sebagai sumber mineral penting, dan kekhawatiran Amerika Serikat tentang investasi Tiongkok yang semakin meningkat dalam infrastruktur dan pertambangan di Greenland (Jacobsen et al., 2024).

Reaksi terhadap rencana tersebut sangat keras. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menolak ide Trump dengan menyebutnya sebagai gagasan “*absurd*” dan menegaskan bahwa “*Greenland is not for sale*”. Pemerintah otonom Greenland sendiri menyatakan terbuka pada kerja sama ekonomi, namun menolak keras wacana penjualan wilayah. Penolakan tersebut menimbulkan ketegangan diplomatik yang cukup serius, termasuk pembatalan kunjungan kenegaraan Trump ke Kopenhagen, sebuah tindakan yang jarang terjadi di antara sesama sekutu NATO (CNR, 2020).

Pantai barat Greenland dikolonisasi dan menjadi bagian dari sistem perdagangan global. Pasar kolonial mengubah gaya hidup Inuit, yang sebelumnya bergantung pada berburu untuk bertahan hidup. Denmark awalnya berusaha untuk membangun industri perburuan paus, tetapi sumber daya cepat habis, sehingga lebih banyak perhatian diberikan pada perburuan anjing laut. Ini menyebabkan pedagang Denmark dan pemburu Inuit saling bergantung pedagang membutuhkan hasil buruan, sementara Inuit bergantung pada senjata dan barang-barang Eropa. Ketika Denmark kehilangan armada lautnya selama Perang Napoleon,

ketergantungan ini menjadi masalah besar. Ini karena pasokan senjata dan barang terhenti. Orang-orang Inuit yang sudah terbiasa berburu dengan senjata api menghadapi kesulitan untuk kembali ke metode berburu konvensional. Kebijakan kolonial Denmark pada tahun 1800-an mengklaim ingin "melindungi budaya Inuit" dari pengaruh Barat. Meskipun demikian, kebijakan ini sebenarnya bersifat paternalistik dan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial dan mencegah penduduk Greenland melakukan kemajuan. Sering dianggap sebagai bentuk awal demokrasi ketika dewan lokal dibentuk dan pemburu terbaik diangkat sebagai pengawas. Namun, fungsinya sebenarnya adalah untuk mengontrol masyarakat dan memecah mereka ke dalam kelas sosial, sesuatu yang sebelumnya tidak ada di Greenland. Ini adalah taktik yang dikenal sebagai "pecah belah dan kuasai"(Sørensen, 2007).

Masyarakat Greenland mulai menentang kebijakan asimilasi pada 1970-an dan menuntut hak yang sama tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Karena tekanan ini, dibuat Home Rule pada 1979 dan Self-Government Act pada 2009. Kedua undang-undang ini memberi Greenland otonomi yang luas dan diakui sebagai bangsa oleh negara-negara di seluruh dunia. Namun, Greenland masih sangat bergantung pada dana Denmark setiap tahun. Meskipun pandangan ini mulai berubah, ketergantungan ekonomi ini secara tidak langsung menghambat kemerdekaan penuh Greenland. Bantuan yang diberikan Denmark sering dianggap sebagai "pemberian baik hati", dan kritik dari Greenland dianggap sebagai sikap tidak tahu berterima kasih. Posisi geopolitik Greenland telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pengaruh di wilayah Arktik diperebutkan oleh Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Denmark menyadari bahwa Greenland memiliki nilai strategis yang signifikan, meskipun upaya Presiden AS Donald Trump untuk membeli wilayah tersebut pada 2019 ditolak (Volquardsen, 2023).

Sejarah kolonial kembali dibahas. Dimana Akhirnya, Denmark mengakui dan meminta maaf atas sejumlah kebijakan kolonial yang merugikan orang Greenland. Kebijakan-kebijakan ini termasuk rasisme institusional, praktik adopsi yang kontroversial, eksperimen sosial pada 1950-an yang memisahkan anak-anak dari keluarga mereka, dan pemasangan alat kontrasepsi tanpa persetujuan pada ribuan perempuan Greenland. Dalam proses rekonsiliasi, kedua pemerintah setuju untuk

membentuk komisi untuk menyelidiki pelanggaran ini pada tahun 2022 (Volquardsen, 2023).

Bersamaan dengan ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland, perkembangan geopolitik di kawasan Arktik dalam dua dekade terakhir menunjukkan pergeseran penting dalam pola interaksi kekuatan besar dunia. Perubahan iklim yang mempercepat pencairan es membuka akses terhadap jalur pelayaran baru serta potensi eksploitasi sumber daya alam yang sebelumnya sulit dijangkau. Kondisi ini menjadikan Arktik tidak lagi dipandang sebagai kawasan periferal, melainkan sebagai ruang strategis baru yang memiliki nilai ekonomi, keamanan, dan politik yang semakin signifikan. Dalam konteks tersebut, Greenland menempati posisi yang sangat strategis. Secara geografis, Greenland berada di titik persilangan antara Amerika Utara dan Eropa, sekaligus menjadi bagian penting dari arsitektur keamanan Atlantik Utara (Borgerson, 2013). Meskipun berstatus sebagai wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, Greenland memiliki tingkat otonomi politik yang semakin berkembang, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan hubungan eksternal tertentu. Posisi unik ini menjadikan Greenland sebagai wilayah yang rawan menjadi arena tarik-menarik kepentingan kekuatan besar

Amerika Serikat memiliki sejarah panjang keterlibatan di Greenland, khususnya melalui kepentingan militer sejak era Perang Dingin dengan keberadaan Pangkalan Udara Thule. Namun, pasca berakhirnya Perang Dingin, perhatian Amerika Serikat terhadap Greenland cenderung menurun seiring meredanya rivalitas global. Situasi ini berubah secara signifikan pada periode 2019–2021, ketika pemerintahan Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk membeli Greenland. Pernyataan tersebut tidak hanya memicu ketegangan diplomatik dengan Denmark, tetapi juga menandai kembalinya Greenland sebagai isu strategis utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Meskipun wacana pembelian Greenland tidak pernah terealisasi, respons kebijakan Amerika Serikat pasca-2019 justru menunjukkan pola yang lebih kompleks.

Bagi Denmark, peningkatan keterlibatan Amerika Serikat di Greenland menghadirkan dilema strategis. Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat dalam NATO, Denmark memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas hubungan

transatlantik. Namun, sebagai negara induk Greenland, Denmark juga berkepentingan mempertahankan kedaulatan serta peran sentralnya dalam pengelolaan wilayah otonom tersebut (Borgerson, 2013). Situasi ini menempatkan Denmark pada posisi yang harus menyeimbangkan kepentingan aliansi keamanan dan kepentingan nasionalnya sendiri. Di sisi lain, Greenland tidak lagi sepenuhnya berperan sebagai objek pasif dalam dinamika geopolitik ini. Pemerintah otonom Greenland semakin aktif menyuarakan kepentingannya, terutama terkait pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan peran internasional. Kondisi ini memperumit relasi antara Amerika Serikat dan Denmark, karena Greenland mulai berfungsi sebagai variabel strategis yang memengaruhi pola hubungan bilateral kedua negara.

Peristiwa ini menarik bagi studi hubungan internasional karena menunjukkan perubahan strategi AS untuk Greenland. Periode 2019–2021 menempatkan instrumen non-militer seperti diplomasi ekonomi, promosi budaya, dan politik identitas di atas instrumen militer selama Perang Dingin. Konsep soft power Joseph S. Nye menjelaskan fenomena ini sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain melalui daya tarik budaya, prinsip politik, dan kebijakan internasional yang sah. Amerika Serikat membangun cerita bahwa keterlibatannya di Greenland menguntungkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung identitas Inuit dengan mendukung budaya mereka (Maxime. G, 2013). Metode ini berbeda dari pendekatan koersif yang berfokus pada penerimaan masyarakat dan legitimasi politik, seperti yang terlihat di Greenland dan Denmark.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini tidak hanya menyoroti signifikansi historis dan kontemporer dari keterlibatan Amerika Serikat di Greenland, tetapi juga memperlihatkan bagaimana dinamika geopolitik, ekonomi, dan identitas dapat saling berinteraksi dalam membentuk hubungan antarnegara. Periode 2019–2021 merupakan fase yang penting untuk dipelajari karena memperlihatkan pergeseran strategi Amerika Serikat dari instrumen militer ke non-militer, sekaligus menunjukkan bagaimana isu kedaulatan dan keamanan dikonstruksikan secara berbeda oleh aktor-aktor yang terlibat. Melalui penggunaan kerangka soft power dan securitization, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ketertarikan Amerika Serikat

terhadap Greenland dan dampaknya bagi hubungan Amerika Serikat–Denmark di tengah persaingan geopolitik Arktik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilandasi oleh persoalan utama. (1) “Bagaimana ketertarikan pembelian Greenland oleh Amerika Serikat, periode 2019–2021 berdampak pada dinamika hubungan Amerika Serikat (AS)-Denmark?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama. (1) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak ketertarikan pembelian Greenland oleh Amerika Serikat, periode 2019–2021 terhadap dinamika hubungan Amerika Serikat–Denmark, dengan menelaah penggunaan instrumen soft power oleh Amerika Serikat serta proses securitization dan counter-securitization yang dilakukan oleh Denmark dan pemerintah otonom Greenland.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai dinamika hubungan Amerika Serikat–Denmark dalam menyikapi isu ketertarikan AS untuk membeli Greenland dan dampaknya terhadap kedaulatan serta hubungan antarnegara di kawasan Arktik.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama menguraikan landasan konseptual yang terdiri atas konsep soft power Joseph S. Nye serta teori securitization dari Copenhagen School, yang digunakan untuk menjelaskan instrumen diplomasi ekonomi, budaya, dan politik identitas yang dijalankan Amerika Serikat, sekaligus menganalisis bagaimana wacana ketertarikan Greenland dikonstruksikan sebagai isu keamanan dan bagaimana Denmark serta pemerintah otonom Greenland merespons melalui counter-securitization. Bagian kedua memaparkan kerangka pemikiran yang disusun untuk menghubungkan teori dan konsep dengan fokus penelitian, dengan tujuan menciptakan alur analisis yang jelas mulai dari strategi ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland, faktor geopolitik yang melatarbelakanginya, hingga respons politik Denmark dan Greenland serta pengaruhnya terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat–Denmark pada periode 2019–2021.

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah karya ilmiah sebelumnya sebagai landasan akademik untuk memperkuat argumen, membangun kerangka pemikiran, serta menemukan celah penelitian (*research gap*) yang dapat menjadi dasar novelty. Penelitian-penelitian terdahulu ini berfokus pada isu-isu terkait Greenland, dinamika keamanan Arktik, serta pendekatan teoritis *securitization* dan *soft power* yang relevan untuk menjelaskan hubungan Amerika Serikat–Denmark pasca ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland. Dengan

mengkaji berbagai literatur tersebut, peneliti dapat memahami arah perkembangan diskursus akademik, sekaligus mengidentifikasi perbedaan konteks, metode, maupun fokus analisis yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

*Penelitian pertama* dilakukan oleh Alexandra Middleton (Middleton, 2024). "Nothing About Us Without Us—Rhetorical Analysis of Greenland's Arctic Policy" adalah penelitian yang diterbitkan dalam *Paradigma: Journal of Economics and Management Research*. Secara ringkas, kebijakan Arktik Greenland tahun 2024 menandai pergeseran struktural dalam hubungannya dengan Denmark dari pola hierarkis menuju relasi yang semakin negosiatif dan setara. Dengan mengusung prinsip "*Nothing About Us Without Us*" dan retorika kebijakan yang asertif, Greenland tidak secara langsung menantang kedaulatan formal Denmark, tetapi secara bertahap mengikis posisi Denmark sebagai satu-satunya representasi eksternal Greenland. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mendorong redefinisi pembagian kewenangan dalam Kerajaan Denmark, di mana kebijakan luar negeri dan Arktik tidak lagi dimonopoli oleh Kopenhagen, melainkan menjadi arena ko-produksi kebijakan. Strategi ini dapat memperkuat posisi tawar Greenland dalam negosiasi politik dan ekonomi, namun sekaligus menimbulkan dilema bagi Denmark antara mempertahankan kohesi internal kerajaan dan menyesuaikan diri dengan realitas geopolitik Arktik yang semakin mengakui Greenland sebagai aktor otonom dengan legitimasi internasional yang kian kuat.

Dokumen Arctic Policy 2024 yang dikeluarkan oleh pemerintah Greenland dianalisis oleh penelitian ini menggunakan metodologi retorika kebijakan. Penelitian ini menyelidiki bagaimana Greenland menggunakan bahasa metaforis, etika, dan retorika untuk menggambarkan dirinya sebagai aktor independen dalam urusan Arktik. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan kritis berbasis retorika. Data penelitian diperoleh dari dokumen kebijakan resmi Greenland. Temuan utama menunjukkan bahwa Greenland menggunakan prinsip "nothing about us without us" sebagai strategi diskursif untuk memperkuat klaim dan autonomi geopolitik agensi.

*Penelitian kedua* adalah penelitian yang dilakukan oleh Ulrik Pram Gad, Sophie Rud, Marc Jacobsen, dan Rasmus K (Pram & Kjaergaard, 2024). Berjudul

“*Greenland’s Desecuritization of Security and Defense*” yang dimuat dalam buku *Greenland in Arctic Security* (University of Michigan Press). Sejumlah studi menegaskan bahwa pemerintah Greenland secara sadar menarik isu pertahanan dan keamanan dari ranah ancaman eksistensial menuju ranah politik normal, dengan tujuan mengurangi dominasi Denmark dalam urusan strategis tanpa memicu eskalasi konflik atau intervensi militer. Dalam literatur yang sama, pertahanan dipandang oleh elit politik Greenland sebagai faktor penghambat kemerdekaan karena tingginya beban finansial dan implikasi struktural, khususnya terkait potensi keterikatan dengan NATO. Oleh karena itu, isu keamanan sengaja dipinggirkan dalam narasi resmi kemerdekaan demi menjaga konsistensi agenda ekonomi mandiri. Penelitian terdahulu juga menyoroti peran identitas Inuit dan narasi “Arktik yang damai” sebagai sumber legitimasi normatif dalam menolak militerisasi, yang sekaligus berfungsi sebagai bentuk resistensi wacana terhadap securitization oleh negara-negara besar.

Secara keseluruhan, kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa strategi Greenland lebih menekankan kalkulasi ekonomi dan pengelolaan identitas dibandingkan kepentingan geopolitik keras, meskipun pendekatan ini dinilai akan menghadapi tantangan signifikan seiring meningkatnya rivalitas strategis di kawasan Arktik. Penelitian ini menggunakan teori *desecuritization* dan *sovereignty games* untuk menjelaskan bagaimana Pemerintah Greenland serta partai politiknya cenderung menurunkan dimensi keamanan dari isu pertahanan, dan lebih menekankan aspek ekonomi serta solusi sipil. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, perdebatan parlemen, dan perjanjian koalisi politik periode 2017–2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pertahanan jarang diprioritaskan dalam politik domestik Greenland, melainkan direduksi ke layanan sipil seperti kontrol perikanan atau *search and rescue*, sehingga menggambarkan strategi politik untuk memperkuat jalan menuju kemerdekaan.

*Penelitian ketiga* adalah buku suntingan oleh Marc Jacobsen, Ole Wæver, dan Ulrik Pram Gad (Jacobsen et al., 2024). Berjudul “*Greenland in Arctic Security: (De)securitization Dynamics under Climatic Thaw and Geopolitical Freeze*”. Penelitian terdahulu mengenai kedudukan strategis Greenland dalam geopolitik Arktik menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sekadar wilayah otonom

yang pasif menjadi aktor asertif yang menggunakan instrumen kebijakan sebagai alat kedaulatan. Studi terbaru menyoroti bahwa mencairnya es laut telah membuka peluang ekonomi masif melalui efisiensi rute pelayaran Arktik yang memangkas jarak tempuh global secara signifikan, namun hal ini sekaligus memicu risiko keamanan unik akibat persaingan kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Tiongkok. Secara khusus, analisis retorik terhadap kebijakan Arktik Greenland tahun 2024 mengungkapkan penggunaan strategi desekritisasi yang disengaja para elit politik di Nuuk cenderung meremehkan isu pertahanan militer guna menghindari beban biaya pertahanan yang dapat menghambat kemandirian finansial. Lebih lanjut, literatur ini menegaskan bahwa terdapat ketegangan antara narasi "bangsa Inuit yang damai" dengan realitas sekritisasi kawasan oleh pihak eksternal, di mana Greenland berupaya menavigasi kedaulatannya melalui "permainan kedaulatan" (*sovereignty game*) melawan Denmark dengan mengutamakan pembangunan ekonomi di atas kepentingan geopolitik militer.

Buku ini menggunakan kerangka teori Securitization Theory dari Copenhagen School untuk memetakan dinamika keamanan di Greenland dalam konteks iklim, identitas, geopolitik, dan kolonialisme. Metode yang digunakan berupa analisis wacana dan studi kasus multi-sektor, mencakup isu lingkungan, identitas Inuit, hingga kebijakan pertahanan AS–Denmark. Temuan penelitian menyoroti bahwa Greenland merupakan entitas hibrid dalam hal kedaulatan: secara formal masih di bawah Denmark, namun secara politik semakin menegaskan jalannya menuju kenegaraan. Buku ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas aplikasi teori sekritisasi ke konteks wilayah non-tradisional seperti Arktik.

*Penelitian keempat* adalah penelitian oleh Gao Fei dan Guo Peiqing (Gao & Guo, 2025). Berjudul “*Unique Risks and Evolving Trends in Arctic Governance: A Forward-Looking Analysis Based on Policies and Practices*” yang diterbitkan dalam *European Journal of Futures Research*. Tulisan ini menyoroti bahwa kawasan Arktik kini tengah menghadapi krisis tata kelola ganda yang disebabkan oleh percepatan perubahan iklim dan eskalasi ketegangan geopolitik pasca 2022. Risiko unik yang diidentifikasi mencakup fenomena *Arctic Amplification* yang mencairkan permafrost serta es laut, yang kemudian memicu persaingan klaim wilayah atas jalur pelayaran strategis dan sumber daya mineral bawah laut di antara

kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Tiongkok. Dampaknya, struktur tata kelola tradisional yang dipimpin oleh Dewan Arktik mengalami stagnasi akibat "sekuritisasi" berlebihan, di mana kepentingan militer mulai mendominasi kerja sama ilmiah dan lingkungan yang sebelumnya menjadi prioritas utama.

Sebagai respons terhadap risiko tersebut, muncul tren evolusi menuju tata kelola heterarkis yang melibatkan aktor global di luar negara-negara Arktik serta integrasi pengetahuan masyarakat adat dalam kebijakan adaptasi. Tren masa depan menunjukkan pergeseran dari regionalisme tertutup menuju model yang lebih inklusif, di mana Arktik dipandang sebagai isu komunal global yang memerlukan keseimbangan antara perlindungan ekosistem yang rapuh dengan pemanfaatan ekonomi melalui rute trans-kutub baru. Kesimpulan dari analisis ini memperingatkan bahwa tanpa adanya re-institusionalisasi yang mampu memisahkan isu keamanan militer dari isu fungsional, Arktik berisiko terjerumus ke dalam konflik hukum dan ekologi yang tidak terkendali, sehingga diperlukan kepastian hukum maritim yang lebih kuat di bawah kerangka internasional yang adaptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan komparatif untuk menelaah risiko dan tren tata kelola Arktik dengan fokus pada kebijakan negara-negara Arktik dan non-Arktik, Uni Eropa, serta aktor non-negara. Data diperoleh dari literatur, laporan pemerintah, dokumen hukum, serta studi kasus empiris. Hasil menunjukkan bahwa tata kelola Arktik kini berada dalam pergeseran dari *securitization* ke *desecuritization*, lalu menuju tren *re-securitization* akibat krisis Ukraina dan kompetisi geopolitik. Artikel ini menekankan munculnya model heterarki multi-level dalam tata kelola Arktik, yang mencerminkan kompleksitas aktor dan kepentingan yang saling berinteraksi.

*Penelitian kelima* adalah penelitian yang dilakukan oleh Wilfrid Greaves dan Daniel Pomerants (Wilfrid Greaves & Daniel Pomerants, 2017). Berjudul “‘Soft Securitization’: Unconventional Security Issues and the Arctic Council” yang dipublikasikan dalam *Politik*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Arctic Council memainkan peran penting dalam tata kelola kawasan Arktik, meskipun mandat resminya secara eksplisit mengecualikan isu keamanan militer. Sejumlah studi

menilai bahwa Dewan Arktik berfungsi sebagai aktor keamanan non-konvensional melalui peran koordinatif dan pembentukan kebijakan pada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan negara dan kesejahteraan manusia, seperti lingkungan, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan keselamatan manusia (Greaves, 2017). Dengan menggunakan kerangka teori securitization, penelitian ini menegaskan bahwa Arctic Council secara terbatas menggunakan bahasa keamanan dalam dokumen dan deklarasi resminya, namun penggunaan tersebut umumnya bersifat *adjectival*, yaitu sekadar menggambarkan relevansi keamanan tanpa membingkai isu tertentu sebagai ancaman eksistensial yang menuntut tindakan luar biasa. Temuan ini relevan bagi penelitian tentang Greenland karena menunjukkan bahwa ruang politik Arktik secara institusional cenderung mendukung pendekatan *soft security* dan desekuritisasi, bukan logika keamanan keras. Dalam konteks ini, strategi Greenland yang menolak securitization isu pertahanan dan lebih menekankan identitas, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat adat sejalan dengan pola tata kelola Arktik yang dibangun melalui Arctic Council, sekaligus memperlihatkan bagaimana aktor non-negara atau wilayah otonom memanfaatkan forum multilateral untuk memperkuat legitimasi politik tanpa harus terjebak dalam kompetisi militer negara besar.

Penelitian ini menggunakan teori *securitization* dengan metode analisis teks terhadap dokumen resmi, deklarasi multilateral, dan pernyataan publik Dewan Arktik. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Dewan Arktik membingkai isu-isu non-tradisional seperti lingkungan dan pembangunan manusia dalam kerangka keamanan non-militer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dewan Arktik lebih banyak menggunakan bahasa keamanan dalam arti “adjektival” (sebagai atribut aspiratif), ketimbang menjadikan isu tersebut sebagai ancaman eksistensial. Hal ini menegaskan peran Dewan Arktik sebagai aktor keamanan non-konvensional di kawasan.

Berdasarkan kelima penelitian di atas penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus dan pendekatannya. Pertama, penelitian ini menitikberatkan pada strategi non-militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Greenland pada periode 2019-2021, khususnya terkait ketertarikan Amerika Serikat untuk membeli wilayah tersebut, melalui diplomasi ekonomi, pengaruh budaya, dan politik identitas suatu

pendekatan yang jarang menjadi fokus utama kajian Arktik, yang umumnya membahas aspek militer atau pertahanan. Kedua, penelitian ini memposisikan periode pasca-gagasan pembelian Greenland sebagai titik analisis untuk menilai perubahan hubungan bilateral AS-Denmark, termasuk respon pemerintah otonom Greenland, sehingga tidak hanya deskriptif pada momen kontroversi 2019, tetapi juga menganalisis dampak keberlanjutannya hingga 2021. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan faktor perubahan iklim, pembukaan jalur pelayaran baru, dan persaingan kekuatan besar (AS, Tiongkok, Rusia) di Arktik sebagai konteks strategis yang membentuk interaksi politik-ekonomi, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika geopolitik kawasan.

## **2.2 Landasan Konseptual**

Penelitian ini menggunakan konsep soft power (Nye) untuk menjelaskan bagaimana Amerika Serikat berupaya memperkuat pengaruhnya di Greenland melalui diplomasi ekonomi, promosi budaya, serta pembangunan hubungan politik yang bersifat persuasif tanpa menggunakan instrumen militer. Pendekatan ini diperkuat dengan kerangka securitization theory (Buzan, Wæver, & de Wilde) di mana Amerika Serikat membingkai kehadiran Tiongkok dan Rusia di Arktik sebagai ancaman keamanan guna memperoleh legitimasi politik bagi keterlibatannya di kawasan tersebut.

Namun, strategi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kedaulatan dan identitas nasional. Konsep kedaulatan menekankan otoritas penuh Denmark dan Greenland dalam menentukan masa depan wilayahnya, sementara konsep identitas nasional menegaskan peran masyarakat Inuit dalam mempertahankan eksistensi budaya, bahasa, dan aspirasi politik mereka. Dengan demikian, upaya soft power dan securitization Amerika Serikat berinteraksi secara kompleks dengan kedaulatan dan identitas nasional Greenland–Denmark, yang pada akhirnya membentuk dinamika hubungan antara kedua pihak pada periode 2019–2021.

### 2.2.1. Konsep Identitas Nasional

Pada dasarnya, identitas sosial dan budaya suatu komunitas dibentuk oleh interaksi politik, simbolik, dan sejarahnya. Identitas nasional Greenland bergantung pada sejarah kolonialisme Denmark dan akar budaya Inuit yang kuat. Masyarakat Greenland, terutama komunitas Inuit, telah didorong oleh kolonialisme untuk merekonstruksi jati diri mereka melalui penggunaan simbol-simbol tradisional seperti bahasa, praktik religius, dan revitalisasi tato tradisional. Fenomena kultural ini bukan hanya ekspresi estetika; itu juga membantu orang menjadi lebih baik dan menunjukkan identitas mereka sebagai bangsa setelah kolonialisme. Identitas nasional Greenland juga direpresentasikan melalui diplomasi budaya, terutama dalam praktik gastronomi. Studi tentang *gastronationalism* menunjukkan bahwa makanan tradisional Greenland diposisikan dalam empat dimensi utama tradisional, natural, hibrid, dan inovatif yang secara simultan memperkuat citra keunikan budaya sekaligus menjadi instrumen diplomasi di ranah internasional (Stæger et al., 2025).

Konsep identitas nasional tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland pascaketertarikan pembelian wilayah Greenland oleh AS pada 2019–2021, karena justru pada titik inilah identitas dipertarungkan, dinegosiasikan, sekaligus dipertahankan. Identitas nasional Greenland, misalnya, tidak hanya diproduksi melalui simbol-simbol budaya seperti bahasa Inuit atau bendera lokal, tetapi juga diperkuat melalui ingatan historis kolonialisme yang menumbuhkan aspirasi dekolonisasi.

Dalam kerangka ini, dapat diuraikan enam pilar utama yang membentuk artikulasi identitas nasional Greenland, yakni NSC (National Symbolic Capital), HMS (Historical Memory System), CIV (Collective Imagined Values), SPC (Shared Political Culture), SED (Socio-Economic Development), dan GPR (Global Perception and Recognition). NSC berfungsi mempertegas klaim keunikan bangsa melalui simbol-simbol kultural HMS menempatkan kolonialisme sebagai narasi penopang perjuangan CIV menegaskan nilai kolektif berupa *self-determination*; SPC menunjukkan diferensiasi orientasi politik antara Denmark dan Greenland, SED mencerminkan ketegangan akibat ketidakmerataan pembangunan sementara

GPR menggarisbawahi pentingnya pengakuan internasional bagi legitimasi identitas politik Greenland di panggung global.

Identitas Inuit Greenland juga memiliki dimensi internasional, bukan hanya nasional. Organisasi Inuit Circumpolar Council (ICC) menunjukkan bahwa identitas Inuit melampaui batas negara dengan membangun solidaritas budaya dan politik dengan komunitas Inuit di Alaska, Kanada, dan Rusia. Ini menunjukkan bahwa identitas nasional Greenland berfungsi sebagai identitas multinasional. Dari perspektif teoritis, identitas ini bukanlah kategori statis, melainkan proses relasional yang terbentuk melalui interaksi sosial. Sebuah penelitian antropologis menegaskan bahwa baik akademisi maupun masyarakat Inuit melihat identitas sebagai konstruksi terbuka, meskipun pemaknaannya bisa berbeda antara pengalaman individual dan konseptualisasi akademik (Ogawa et al., 2025). Selain melalui pilar-pilar tradisional, identitas nasional Greenland kini tengah mengalami redefinisi melalui ruang digital sebagai bentuk kedaulatan informasi. Di tengah meningkatnya minat global terhadap Arktik, masyarakat Greenland menggunakan platform digital untuk merebut kembali narasi mereka dari perspektif eksotis yang sering kali dipaksakan oleh media Barat. Upaya ini bukan sekadar digitalisasi budaya, melainkan sebuah strategi untuk memperkuat *Global Perception and Recognition* (GPR) secara mandiri. Dengan mengintegrasikan bahasa Kalaallisut ke dalam infrastruktur teknologi dan media sosial, generasi muda Greenland membangun "ruang aman" digital yang menghubungkan memori sejarah (HMS) dengan aspirasi masa depan, sekaligus membedakan identitas digital mereka dari entitas Denmark (The Artic Six, 2025).

Oleh karena itu, identitas nasional Greenland dapat dipahami sebagai fenomena yang mencakup banyak aspek, termasuk rekonstruksi budaya setelah kolonialisme, ekspresi budaya melalui makanan dan diplomasi, solidaritas Inuit di seluruh dunia, dan dinamika sosial yang kompleks dalam hubungannya dengan organisasi dan keyakinan masyarakat. Identitas ini membantu konsolidasi internal dan memperkuat posisi Greenland dalam menghadapi tantangan geopolitik, seperti dinamika hubungan dengan Denmark dan strategi non-militer AS di Arktik.

### 2.2.2. Teori Soft Power

Joseph S. Nye Jr. pertama kali menggunakan konsep soft power dalam bukunya *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power* pada tahun 1990. Kemudian, dalam bukunya yang berjudul *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, konsep ini diperdalam. "Kemampuan suatu negara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya melalui daya tarik (*attraction*) ketimbang paksaan (*coercion*) atau imbalan (*payment*)" adalah definisi soft power menurut Nye. Dengan kata lain, soft power beroperasi melalui legitimasi, citra, dan nilai yang menarik sehingga aktor lain bersedia mengikuti atau mendukung suatu agenda tanpa dipaksa. Nye membedakan kekuatan halus dari kekuatan keras yang bergantung pada militer dan ekonomi. Kekuasaan lemah berasal dari tiga pilar utama: budaya (budaya), nilai politik (nilai politik), dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan moral (Nye, 1990).

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, kekuasaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kemampuan untuk memaksa aktor lain melalui kekuatan militer atau tekanan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya pendekatan konstruktivis dan kritis dalam studi hubungan internasional, konsep *soft power* muncul sebagai instrumen penting dalam menjelaskan bagaimana negara memengaruhi aktor lain melalui daya tarik, legitimasi, dan persuasi. Joseph S. Nye mendefinisikan soft power sebagai kemampuan suatu negara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya melalui daya tarik (*attraction*) alih-alih paksaan (*coercion*) atau pembayaran (*payment*) (Nye, 2011). Dalam kerangka ini, nilai-nilai, budaya, kebijakan luar negeri, serta legitimasi moral menjadi sumber utama kekuasaan.

Teori soft power sering digunakan dalam kajian hubungan internasional modern untuk menjelaskan bagaimana aktor negara dan non-negara menggunakan instrumen non-militer untuk membangun kekuatan. Misalnya, Cull menekankan bahwa diplomasi publik adalah sarana penting untuk soft power karena memungkinkan negara untuk membentuk opini publik global melalui komunikasi, pendidikan, media, dan pertukaran budaya. Sementara itu, Melissen berpendapat bahwa soft power adalah tentang menciptakan ruang diskusi dua arah antara negara

dan audiens internasional. Pandangan ini memperluas pemahaman soft power sebagai bukan hanya alat untuk memaksakan hegemoni kultural, tetapi juga sebagai cara untuk berkolaborasi dan berpartisipasi (Cull & Sadlier, 2009).

Dalam konteks Greenland, soft power memainkan peran yang sangat signifikan dalam strategi Amerika Serikat. Berbeda dengan pendekatan hard power yang berpotensi memicu resistensi politik dan pelanggaran norma internasional, soft power memungkinkan Amerika Serikat untuk membangun pengaruh secara gradual dan relatif tidak konfrontatif. Pendekatan ini menjadi semakin relevan mengingat status Greenland sebagai wilayah otonom dengan sensitivitas tinggi terhadap isu kedaulatan, identitas, dan pengalaman kolonial. Salah satu dimensi utama soft power Amerika Serikat di Greenland tercermin dalam diplomasi ekonomi dan pembangunan. Bantuan finansial, dukungan terhadap pengembangan kapasitas lokal, serta keterlibatan dalam sektor pendidikan dan penelitian ilmiah digunakan untuk membangun citra Amerika Serikat sebagai mitra yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan Greenland. Pendekatan ini secara simbolik membedakan Amerika Serikat dari aktor lain yang dipersepsikan lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya semata. Dengan membingkai keterlibatannya sebagai bentuk kerja sama pembangunan, Amerika Serikat berupaya menanamkan persepsi positif dan meningkatkan penerimaan sosial terhadap kehadirannya.

Selain itu, soft power Amerika Serikat juga beroperasi melalui dimensi normatif dan wacana. Amerika Serikat secara konsisten memosisikan dirinya sebagai pendukung hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) dan pembangunan berkelanjutan, meskipun praktik kebijakannya tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan prinsip tersebut. Dalam konteks Greenland, narasi dukungan terhadap otonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal digunakan untuk membangun legitimasi politik dan moral. Narasi ini penting karena masyarakat Greenland memiliki memori historis yang kuat terhadap praktik kolonial, sehingga pendekatan yang terlalu koersif berisiko memicu penolakan luas. Soft power juga tercermin dalam diplomasi budaya dan simbolik. Pertukaran akademik, kerja sama penelitian Arktik, serta keterlibatan lembaga-lembaga Amerika Serikat dalam studi iklim dan lingkungan berfungsi sebagai sarana untuk membangun jejaring epistemik dan kepercayaan (*trust-building*). Melalui kerja sama ilmiah, Amerika Serikat tidak

hanya memperoleh data strategis mengenai Arktik, tetapi juga membangun citra sebagai aktor yang berkontribusi pada pengetahuan global dan perlindungan lingkungan. Dimensi ini sangat penting dalam konteks Arktik, di mana legitimasi sering kali ditentukan oleh kontribusi terhadap sains dan tata kelola lingkungan.

Namun, penggunaan soft power Amerika Serikat di Greenland tidak sepenuhnya bebas dari problematika. Sejumlah analis berpendapat bahwa soft power dalam konteks ini sering kali berfungsi sebagai pelengkap atau bahkan penutup bagi kepentingan strategis yang lebih keras, seperti pengamanan jalur maritim, pengawasan militer, dan akses terhadap sumber daya mineral kritis. Dengan kata lain, soft power beroperasi sebagai bagian dari strategi *smart power*, yakni kombinasi antara hard power dan soft power untuk mencapai tujuan geopolitik secara lebih efektif. Dalam perspektif kritis, soft power Amerika Serikat di Greenland juga dapat dipahami sebagai bentuk pengaruh struktural yang menciptakan ketergantungan jangka panjang (Nye, 2011). Ketika bantuan ekonomi, kerja sama pendidikan, dan investasi strategis menjadi sumber utama pembangunan, ruang otonomi politik Greenland berpotensi menyempit. Pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia bagi pemerintah otonom Greenland semakin dibatasi oleh kepentingan dan ekspektasi mitra eksternal yang dominan. Dalam konteks ini, soft power tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik, tetapi juga sebagai mekanisme halus untuk membentuk preferensi dan orientasi kebijakan.

Konsep soft power dapat membantu menjelaskan bagaimana negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Denmark berusaha membentuk persepsi dan legitimasi tentang klaim atau kepentingannya di wilayah Arktik. Misalnya, Amerika Serikat menganggap kehadiran Tiongkok dan Rusia di Arktik sebagai ancaman dan mencoba melindungi wilayah untuk memperkuat kepentingannya. Sebaliknya, Denmark dan Greenland menggunakan kekuatan lemah yang berasal dari identitas dan budaya nasional mereka, seperti tradisi Inuit, makanan, dan cerita tentang keberlanjutan lingkungan, untuk memperkuat citra mereka di mata dunia (Ogawa et al., 2025). Ini menunjukkan bahwa soft power tidak hanya penting dalam hubungan antara negara besar, tetapi juga penting bagi aktor kecil atau semi-otonom yang ingin menegaskan identitas dan kedaulatan mereka sendiri.

Dengan demikian, analisis soft power dalam kasus Greenland menunjukkan bahwa kekuasaan dalam hubungan internasional bersifat multidimensional dan beroperasi melalui berbagai lapisan. Soft power Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari konteks securitization dan persaingan geopolitik di Arktik, tetapi juga tidak dapat direduksi menjadi instrumen manipulatif semata. Ia berfungsi sebagai arena negosiasi antara daya tarik, legitimasi, dan kepentingan strategis. Pemahaman ini penting untuk melihat bagaimana Greenland tidak hanya menjadi objek pengaruh, tetapi juga aktor yang mampu merespons, menegosiasikan, dan membatasi dampak soft power melalui strategi counter-narrative dan penegasan identitas politiknya.

### 2.2.3. Teori Securitization

*Securitization Theory* yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde melalui *Copenhagen School* menghadirkan sebuah perspektif penting dalam studi keamanan internasional. Teori ini menekankan bahwa suatu isu tidak secara otomatis menjadi masalah keamanan, melainkan melalui proses konstruktif yang disebut *securitization*, di mana aktor politik atau securitizing actor mengangkat isu tertentu sebagai ancaman eksistensial melalui tindakan diskursif yang dikenal dengan *speech act*. Dalam konteks ini, keamanan dipahami bukan hanya sebagai realitas objektif, melainkan sebagai hasil dari praktik sosial dan politik yang dibentuk oleh wacana. Misalnya, pemerintah dapat mendefinisikan kehadiran aktor asing di suatu wilayah strategis sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan identitas nasional, dan melalui retorika politik isu tersebut kemudian diterima oleh audiens (masyarakat, parlemen, atau komunitas internasional) sebagai persoalan yang mendesak (Titilayo Aishat Otukoya, 2024).

Kesuksesan proses sekuritisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan aktor untuk menggambarkan masalah sebagai ancaman, tetapi juga bagaimana audiens menerimanya. Tanpa legitimasi publik atau politik, tuduhan ancaman tidak akan sah dan tidak akan menghasilkan kebijakan luar biasa. Oleh karena itu,

securitization mengalihkan masalah dari ranah politik biasa ke ranah darurat yang memungkinkan tindakan khusus seperti penguatan militer, pembatasan hak, atau intervensi kebijakan yang agresif. Dengan demikian, teori ini tidak hanya menawarkan alat analisis untuk memahami mengapa negara atau aktor lain mengangkat isu tertentu sebagai ancaman, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana wacana keamanan berhubungan erat dengan legitimasi, identitas, serta kebijakan publik.

Teori securitization tidak hanya dipahami sebagai proses diskursif itu juga memiliki aplikasi praktis dalam hubungan internasional. Pertama, teori ini menunjukkan bahwa keamanan dibangun secara sosial dan politik daripada diberikan atau ada begitu saja. Misalnya, masalah seperti migrasi atau perubahan iklim tidak secara otomatis dianggap sebagai ancaman; mereka menjadi ancaman ketika para politisi menafsirkannya sebagai ancaman bagi eksistensi negara atau identitas nasional. Contohnya dapat dilihat selama krisis pengungsi di Eropa, ketika beberapa negara menganggap kedatangan migran sebagai ancaman terhadap keamanan domestik dan kohesi sosial, mendorong lahirnya kebijakan pengetatan perbatasan yang sebelumnya mungkin tidak dapat dibenarkan dalam politik konvensional.

Kedua, *securitization theory* juga mengajarkan bahwa terdapat perbedaan antara *politicization* dan *securitization*. Isu yang dipolitikkan masih berada dalam ranah diskusi normal dan dapat ditangani dengan mekanisme kebijakan biasa, sedangkan isu yang disekuritisasi sudah naik level ke ranah darurat yang membenarkan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*). Misalnya, politisasi isu energi mungkin hanya mendorong kebijakan subsidi atau diversifikasi, tetapi ketika energi dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan nasional, maka negara dapat mengerahkan militer untuk menjaga infrastruktur energi strategis.

Ketiga, aspek normatif adalah yang sering diperdebatkan bahwa sekuritisasi tidak selalu netral karena ketika suatu masalah dianggap sebagai ancaman, para politisi dapat menggunakan legitimasi tersebut untuk membatasi kebebasan sipil, mengontrol opini publik, atau bahkan memperluas kekuasaan negara. Dengan kata

lain, teori ini mengingatkan bahwa klaim "demi keamanan" dapat menjadi alat politik untuk mempertahankan otoritas.

Selain dipahami sebagai proses diskursif yang mengubah isu non-keamanan menjadi isu keamanan, *securitization* juga berkaitan erat dengan pembentukan identitas politik, konstruksi kepentingan nasional, serta pembentukan persepsi ancaman dalam hubungan internasional. Dalam kerangka ini, keamanan tidak dipahami sebagai kondisi objektif semata, melainkan sebagai hasil dari praktik sosial dan politik yang dimediasi melalui bahasa, simbol, dan wacana. Dengan kata lain, suatu isu menjadi ancaman keamanan bukan karena sifat inherennya, tetapi karena berhasil dipresentasikan sebagai ancaman eksistensial yang memerlukan respons luar biasa (*extraordinary measures*). Dalam konteks kawasan strategis seperti Arktik, *securitization* memiliki fungsi yang melampaui respons terhadap ancaman material. *Securitization* juga berperan sebagai mekanisme legitimasi atas kehadiran, intervensi, dan ekspansi pengaruh aktor eksternal. Arktik, yang sebelumnya dipahami sebagai ruang kerja sama ilmiah dan tata kelola lingkungan, mengalami pergeseran makna menjadi arena persaingan geopolitik akibat perubahan narasi keamanan. Melalui proses ini, aktor negara dapat membingkai keterlibatan mereka sebagai kebutuhan strategis yang sah, bahkan mendesak, meskipun berpotensi membatasi ruang otonomi aktor lokal.

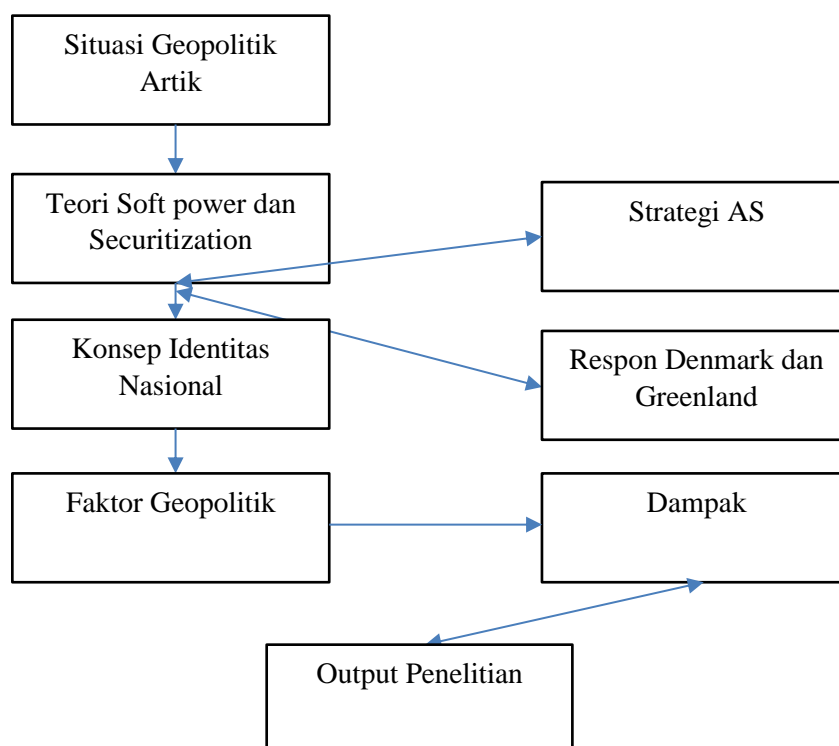
Menurut *Copenhagen School*, khususnya pemikiran Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, keberhasilan *securitization* sangat bergantung pada penerimaan audiens terhadap klaim ancaman yang diajukan oleh aktor *securitizing* (Buzan, 1998). Audiens dalam konteks ini bukan sekadar pendengar pasif, melainkan aktor yang memiliki kapasitas untuk menerima, menolak, atau menegosiasikan makna ancaman tersebut. Tanpa penerimaan audiens, sebuah klaim *securitization* akan kehilangan legitimasi politiknya dan gagal menghasilkan tindakan luar biasa yang diinginkan. Hal ini membuktikan bahwa *securitization* adalah proses intersubjektif yang bergantung pada interaksi dan legitimasi. Dengan demikian, teori *securitization* bukan hanya alat analisis yang membantu kita memahami mengapa isu tertentu bisa berubah status menjadi masalah keamanan, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis tentang siapa yang berhak mendefinisikan ancaman, bagaimana audiens merespons, dan konsekuensi apa yang muncul dari normalisasi kebijakan

darurat. Ia menyoroti hubungan erat antara keamanan, wacana, kekuasaan, dan legitimasi dalam politik global kontemporer.

Namun, strategi securitization tersebut berhadapan dengan realitas identitas politik Greenland yang kompleks dan berbeda dari asumsi aktor eksternal. Identitas Inuit, pengalaman kolonial di bawah Denmark, serta sejarah marginalisasi dalam pengambilan keputusan strategis membentuk sensitivitas yang tinggi terhadap narasi keamanan yang datang dari luar. Bagi masyarakat Greenland, framing keamanan yang mengabaikan dimensi identitas dan lingkungan sering kali dipersepsikan sebagai reproduksi relasi kuasa yang asimetris, di mana kepentingan strategis aktor besar lebih diutamakan dibandingkan aspirasi lokal. Akibatnya, securitization Amerika Serikat tidak diterima secara pasif, melainkan direspons melalui proses *counter-securitization* yang menekankan identitas, kedaulatan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*) (Buzan, 1998). Dalam konteks ini, counter-securitization tidak hanya berfungsi sebagai penolakan terhadap klaim ancaman, tetapi juga sebagai upaya aktif untuk merebut kembali kontrol atas makna keamanan itu sendiri. Keamanan, bagi Greenland, tidak semata-mata berkaitan dengan militerisasi dan persaingan kekuatan besar, melainkan juga mencakup perlindungan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan kelangsungan identitas budaya masyarakat Inuit. Dalam kasus Greenland, Amerika Serikat secara strategis menggunakan apa yang disebut sebagai "audiens ganda" Denmark sebagai otoritas kedaulatan formal, dan masyarakat dan pemerintah otonom Greenland sebagai pihak yang terdampak secara langsung. Amerika Serikat berusaha menciptakan kesan bahwa kehadiran mereka melindungi keamanan kolektif daripada memperluas dominasi geopolitiknya melalui wacana ancaman yang menekankan tindakan lebih lanjut Rusia dan Tiongkok di Arktik. Dalam cerita ini, Amerika Serikat digambarkan sebagai penyedia keamanan yang bekerja untuk stabilitas regional dan kepentingan bersama.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan kerangka pemikiran ini adalah untuk mengintegrasikan konsep, teori, dan variabel penelitian secara sistematis dan koheren guna memberikan arah analisis yang jelas. Situasi geopolitik Arktik yang semakin kompetitif, isu kedaulatan wilayah, serta konstruksi identitas nasional Greenland dan Denmark menjadi landasan penting dalam memahami rencana pembelian Amerika Serikat terhadap Greenland. Kerangka pemikiran ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana dinamika tersebut memengaruhi perumusan kebijakan Amerika Serikat, respons Denmark, serta implikasinya terhadap hubungan bilateral kedua negara pada periode penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

(Sumber : diolah sendiri untuk keperluan penelitian)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan dibuat dan dijalankan, terutama ketika data angka atau statistik tidak tersedia atau sulit diperoleh. Tujuan utama metode ini adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara jelas dan apa adanya, bukan untuk menguji teori atau menghitung hubungan sebab-akibat. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui literatur revidu atau survei kualitatif secara daring kepada orang-orang yang dianggap memahami kebijakan tersebut, seperti pejabat, akademisi, atau pihak terkait lainnya. Peneliti kemudian mengumpulkan berbagai informasi tersebut dan menyusunnya menjadi gambaran yang utuh tentang kebijakan yang diteliti (Mitton, 2017).

Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mengumpulkan informasi yang beragam dan tidak terduga, namun tetap dapat dibandingkan secara sistematis, terutama dalam studi perbandingan antarnegara. Tujuan utama metode ini adalah menggambarkan suatu kebijakan, sistem, atau fenomena sosial secara jelas, apa adanya, dan sedekat mungkin dengan pengalaman para pelaku atau pihak yang terlibat. Metode ini menggunakan pertanyaan terbuka yang terstruktur untuk mengumpulkan perspektif, pengalaman, dan praktik nyata dari pemangku kepentingan, lalu menyusunnya menjadi gambaran yang utuh dan dapat dipahami tentang bagaimana suatu kebijakan dirancang, dijalankan, dan dievaluasi. Fokus metode ini bukanlah untuk menafsirkan secara mendalam atau membangun teori baru, tetapi untuk memberikan

deskripsi yang akurat dan representatif tentang apa yang terjadi di dunia kebijakan saat ini, sehingga dampak yang lebih besar (Mitton, 2017).

Metode ini tidak hanya memungkinkan peneliti untuk menjelaskan hubungan Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memahami dinamika wacana politik, makna yang dibuat oleh aktor internasional, dan strategi yang digunakan untuk securitization dan soft power. Adapun langkah-langkah utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah: (1) memunculkan permasalahan riset secara umum terkait bagaimana strategi rencana pembelian Amerika Serikat terhadap Greenland pada tahun 2019–2021 dijalankan serta bagaimana respon Denmark–Greenland melalui proses counter-securitization terbentuk, (2) seleksi tempat dan subjek yang relevan berkaitan dengan kawasan Arktik, khususnya keterlibatan Amerika Serikat, Denmark, dan pemerintah otonom Greenland dalam isu tersebut.

(3) pengumpulan data yang dianggap relevan dari sumber-sumber sekunder yang kredibel seperti situs resmi pemerintah AS (misalnya *U.S. Department of State*), situs resmi Pemerintah Denmark dan Greenland, jurnal akademik terkait seperti *Arctic Review on Law and Politics* atau *Journal of International Relations and Development*, serta dokumen resmi kebijakan luar negeri AS, Denmark, dan Uni Eropa, (4) interpretasi data terkait upaya securitization yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama dengan menjadikan kehadiran Tiongkok dan Rusia di Arktik sebagai ancaman keamanan, serta strategi diplomasi dan soft power yang menyertainya, (5) membangun kerangka konseptual atau teoretis berdasarkan interpretasi data dengan mengacu pada teori securitization (Copenhagen School) dan konsep soft power (Nye).

(5a) menyempitkan pertanyaan penelitian agar lebih fokus pada dinamika hubungan trilateral AS–Denmark–Greenland, (5b) pengumpulan data tambahan dari media internasional yang kredibel seperti *BBC News*, *The Guardian*, *Foreign Policy*, *Arctic Today*, dan *The Washington Post* untuk

memperkuat analisis serta (6) menuliskan temuan serta konklusi yang berhubungan dengan strategi rencana pembelian Amerika Serikat dan respon Denmark–Greenland yang tercermin dalam praktik diplomasi dan counter-securitization. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penelitian dapat secara sistematis menjawab pertanyaan utama dan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hubungan internasional kontemporer.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Studi ini berfokus pada strategi rencana pembelian Amerika Serikat terhadap Greenland dari 2019 hingga 2021 dan bagaimana Denmark dan pemerintah otonom Greenland menanggapi strategi tersebut. Studi ini secara khusus menyelidiki bagaimana Amerika Serikat menggunakan mekanisme securitization untuk menggambarkan kehadiran Tiongkok dan Rusia di kawasan Arktik sebagai ancaman eksistensial dan memanfaatkan instrumen soft power seperti diplomasi politik, ekonomi, investasi, dan retorika simbolik untuk memperkuat kebijakannya.

Fokus penelitian ini juga diarahkan untuk memahami dinamika interaksi diplomatik antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland yang muncul sebagai konsekuensi dari ketertarikan pembelian tersebut. Penelitian ini tidak hanya menyoroti strategi hegemonik Amerika Serikat dalam memperluas pengaruhnya di Arktik, tetapi juga menelaah bagaimana Greenland sebagai aktor otonom mulai menunjukkan posisi politiknya yang semakin independen dari Denmark, baik melalui wacana publik maupun manuver diplomasi. Dalam hal ini, penelitian berupaya mengungkap bagaimana kepentingan ekonomi, isu kedaulatan, serta identitas nasional Greenland bersinggungan dengan strategi keamanan Amerika Serikat dan respons diplomatik Denmark. Dengan demikian, penelitian ini memberikan fokus yang lebih luas dengan melihat isu Arktik bukan hanya sebagai arena perebutan pengaruh geopolitik

global, tetapi juga sebagai ruang di mana aktor kecil seperti Greenland memiliki peran signifikan dalam membentuk arah diplomasi dan hubungan internasional di kawasan tersebut.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan bagaimana Denmark dan Greenland berusaha melakukan counter-securitization untuk mempertahankan kedaulatan dan identitas nasional mereka dan menyeimbangkan kepentingan strategis antara mereka sebagai sekutu utama dan dinamika politik internal Greenland.

### **3.3 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Sumber data meliputi dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, Denmark, dan pemerintah otonom Greenland, seperti laporan kebijakan luar negeri, dokumen parlemen, serta pernyataan resmi pejabat negara yang terkait dengan kebijakan Arktik. Selain itu, data juga dikumpulkan dari situs resmi pemerintah, lembaga internasional, serta laporan penelitian yang berhubungan dengan geopolitik Arktik. Media daring internasional seperti *BBC News*, *The Guardian*, *South Tiongkok Morning Post*, dan *Arctic Today* juga menjadi sumber penting dalam melihat dinamika wacana publik mengenai kebijakan Amerika Serikat terhadap Greenland.

Sumber akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel penelitian juga digunakan untuk memperkuat analisis teoretis, termasuk kajian mengenai kedaulatan, identitas nasional, soft power, dan teori securitization. Dengan demikian, data penelitian ini mencakup kombinasi antara sumber primer berupa dokumen resmi serta sumber sekunder berupa literatur akademik dan media, sehingga analisis yang dihasilkan lebih komprehensif. Selain bersumber pada dokumen resmi, penelitian ini juga memanfaatkan publikasi

akademik, laporan penelitian, dan artikel dari jurnal internasional yang relevan dengan topik Arktik, strategi keamanan, serta diplomasi kedaulatan.

Kehadiran sumber akademik tidak hanya memperkuat kerangka teoritis, melainkan juga membantu menyeimbangkan perspektif yang mungkin bias apabila hanya bersandar pada sumber politik atau media. Dengan mengombinasikan dokumen kebijakan, literatur ilmiah, dan analisis wacana dari media, data yang diperoleh menjadi lebih kaya dan multidimensional. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola argumentasi, membandingkan perbedaan kepentingan antaraktor, serta memahami dinamika identitas nasional Greenland dalam konteks geopolitik yang lebih luas.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data utama. Studi literatur berfungsi untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen serta publikasi yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, dokumen resmi pemerintah, laporan kebijakan, dan media terpercaya. merupakan metode penelitian yang sangat penting karena membantu peneliti memahami, mengumpulkan, dan menyusun pengetahuan yang sudah ada dalam bidang penelitian. Literature review berguna untuk memetakan penelitian sebelumnya, menilai bukti yang ada, dan menghindari kesimpulan yang keliru akibat pemilihan sumber yang tidak sistematis di tengah perkembangan ilmu yang sangat cepat dan lintas disiplin. literatur reuiu yang dilakukan dengan baik dan sistematis dapat menjadi dasar yang kuat untuk pengembangan teori, identifikasi celah penelitian, dan penyusunan kerangka konseptual. Beberapa jenis penerbitan, yaitu penerbitan sistematis, penerbitan semi-sistemik, dan penerbitan integratif, digunakan sesuai dengan tujuan penelitian (Snyder, 2019). Untuk mendapatkan

pemahaman mendalam tentang strategi rencana pembelian AS terhadap Greenland, serta tanggapan Denmark dan pemerintah otonom Greenland dari tahun 2019 hingga 2021. Metode ini melibatkan beberapa langkah. Pertama, mencari dan memilih literatur yang relevan. Ini termasuk dokumen resmi tentang kebijakan luar negeri, pernyataan parlemen, dan dokumen resmi pejabat dari Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat. Kedua, mengumpulkan data dari literatur akademik yang membahas geopolitik Arktik, teori securitization, soft power, kedaulatan, dan identitas nasional.

Ketiga, menggunakan portal berita internasional seperti BBC News, The Guardian, South Tiongkok Morning Post, dan Arctic Today untuk meninjau opini publik, wacana diplomasi, dan dinamika hubungan bilateral. Keempat, mengumpulkan dokumen tambahan melalui situs resmi dan publikasi institusi internasional yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi, keamanan, dan identitas nasional. Untuk membuat kerangka analisis yang lengkap, semua data kemudian dievaluasi, diklasifikasikan, dan dibandingkan. Metode penelitian literatur ini memungkinkan peneliti mempelajari fakta politik dan historis serta membandingkan wacana, legitimasi, dan hubungan antara strategi AS dan reaksi Denmark–Greenland dalam konteks geopolitik Arktik yang dinamis.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana seluruh informasi dari dokumen resmi, jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan media internasional dikaji untuk menangkap pola, makna, dan dinamika hubungan antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland (Snyder, 2019). Proses analisis dimulai dengan seleksi data, yaitu memilah informasi yang relevan agar fokus pada isu utama penelitian. Selanjutnya, data diorganisasi dan disajikan secara sistematis melalui narasi,

tabel, atau bagan agar mempermudah identifikasi tema-tema penting, seperti strategi soft power AS, securitization, counter-securitization, dan dampaknya terhadap hubungan bilateral.

Analisis dilanjutkan dengan pendekatan tematik, menyoroti isu-isu sentral sesuai kerangka teori yang digunakan. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai referensi agar temuan lebih akurat. Akhirnya, hasil analisis diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, sekaligus memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi diplomasi, konstruksi wacana keamanan, dan interaksi politik di kawasan Arktik secara komprehensif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Greenland pada periode 2019–2021 tidak dapat dipahami sebagai upaya aneksasi dalam pengertian klasik yang mengandalkan kekuatan militer atau pengambilalihan teritorial secara langsung. Sebaliknya, pendekatan yang ditempuh Amerika Serikat lebih tepat dipahami sebagai strategi nonmiliter yang berkaitan dengan ketertarikan pembelian wilayah, yang dijalankan melalui kombinasi diplomasi ekonomi, kehadiran diplomatik, dan konstruksi wacana keamanan di kawasan Arktik. Pernyataan Presiden Donald Trump mengenai ketertarikan untuk membeli Greenland pada 2019 menjadi titik balik yang menegaskan meningkatnya perhatian strategis Amerika Serikat terhadap wilayah tersebut. Meskipun wacana tersebut memicu ketegangan diplomatik dengan Denmark, kebijakan Amerika Serikat pasca-2019 menunjukkan pergeseran pendekatan menuju strategi yang lebih halus dan tidak konfrontatif. Hal ini tercermin dari peningkatan bantuan ekonomi, pembukaan kembali Konsulat Amerika Serikat di Nuuk, serta penguatan kerja sama di bidang pendidikan, riset Arktik, dan pembangunan kapasitas lokal di Greenland.

Respons Denmark terhadap kebijakan Amerika Serikat menunjukkan pola penyesuaian strategis yang bersifat moderat. Denmark tidak mengambil langkah konfrontatif, melainkan berupaya menjaga keseimbangan antara komitmen aliansi transatlantik dengan Amerika Serikat dan kepentingan kedaulatan nasionalnya atas Greenland. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan

perhatian domestik terhadap Greenland serta penguatan dialog politik dengan pemerintah otonom wilayah tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Greenland tidak lagi berperan sebagai objek pasif dalam dinamika hubungan Amerika Serikat–Denmark. Melalui peningkatan otonomi politik dan pemanfaatan ruang diplomatik yang tersedia, Greenland mulai berfungsi sebagai aktor strategis yang memengaruhi pola interaksi bilateral kedua negara. Posisi Greenland sebagai wilayah otonom menjadi variabel penting yang memperumit sekaligus membentuk ulang hubungan Amerika Serikat–Denmark dalam konteks geopolitik Arktik.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa strategi nonmiliter yang berkaitan dengan ketertarikan pembelian wilayah relevan untuk menjelaskan upaya perluasan pengaruh Amerika Serikat terhadap Greenland pada periode 2019–2021. Strategi tersebut tidak hanya berdampak pada posisi Greenland, tetapi juga mendorong terjadinya penyesuaian dalam hubungan Amerika Serikat–Denmark, yang ditandai oleh dinamika kerja sama, ketegangan terbatas, dan negosiasi kepentingan dalam lanskap geopolitik Arktik yang semakin kompetitif.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa strategi Amerika Serikat tersebut tidak berjalan secara sepihak. Denmark dan pemerintah otonom Greenland merespons melalui praktik counter-securitization dengan menolak narasi yang berpotensi mereduksi kedaulatan dan identitas nasional Greenland. Pemerintah Denmark secara konsisten menegaskan status hukum Greenland sebagai bagian dari Kerajaan Denmark, sementara pemerintah Greenland menekankan prinsip self-determination dan identitas Inuit sebagai fondasi utama dalam menentukan masa depan politiknya. Penolakan tegas terhadap gagasan pembelian Greenland, baik oleh elit politik maupun masyarakat lokal, menunjukkan bahwa identitas nasional dan memori kolonial menjadi faktor kunci dalam membatasi penetrasi kekuatan eksternal.

Dari perspektif hubungan bilateral, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Amerika Serikat terhadap Greenland pada periode 2019–2021 tidak menyebabkan keretakan struktural dalam hubungan Amerika Serikat–Denmark

sebagai sesama sekutu NATO, tetapi menciptakan ketegangan diplomatik laten yang menggeser pola interaksi dari hubungan bilateral tradisional menjadi dinamika trilateral Amerika Serikat–Denmark–Greenland. Greenland semakin tampil sebagai aktor otonom yang memiliki ruang manuver politik sendiri, bukan sekadar objek kebijakan negara besar. Hal ini menandai transformasi penting dalam politik Arktik, di mana aktor kecil mampu memanfaatkan identitas, hukum internasional, dan diplomasi budaya untuk menyeimbangkan tekanan geopolitik dari kekuatan besar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan waktu dan aktor analisis, khususnya dengan memasukkan perkembangan geopolitik Arktik pasca 2021. Hal ini penting mengingat dinamika kawasan Arktik yang terus mengalami perubahan seiring meningkatnya kepentingan strategis negara-negara besar dalam bidang keamanan, ekonomi, dan sumber daya alam. Dengan cakupan waktu dan aktor yang lebih luas, penelitian mendatang diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola interaksi, kepentingan, serta implikasi geopolitik yang muncul di kawasan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ackren, M. (2014). *Greenland as a self-governing sub-national territory in international relations: past, current and future perspectives*.
- Ackren, M., & Jakobsen, U. (2013). *Greenland as a self-governing sub-national territory in international relations: past, current and future perspectives*.
- Allison, E. (2014). *Arctic Oil and Gas Production and Potential*.  
<https://www.aapg.org/news-and-media/details/blog/articleid/12834/arctic-oil-and-gas-production-and-potential>
- AmCham. (2025). *Transatlantic-Economy-DK-US*.
- AMSA. (2010). *Arctic Council Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report*.
- Anderson, P., & Kalvig. (2022). *Does China control Arctic mineral raw materials How much, what, how and why?*
- Arctic, C. (2019). *The Kingdom of Denmark*. <https://arctic-council.org/about/states/denmark/>
- Bloomberg. (2026). *Membongkar 10 Fakta Greenland, Negeri Arktik yang Penuh Kejutan*.  
<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/97009/membongkar-10-fakta-greenland-negeri-arktik-yang-penuh-kejutan>
- Borgerson, S. (2013). *The Coming Arctic Boom As the Ice Melts, the Region Heats Up*.  
<https://www.foreignaffairs.com/articles/commons/2013-06-11/coming-arctic-boom>
- Buzan, B. (1998). *Security - A New Framework For Analysis*.
- CBS. (2026). *Maps show why Greenland is so important as the Arctic warms*.  
<https://www.cbsnews.com/news/greenland-maps-important-shipping-defense-arctic-warms/>
- Clive, A. (2003). *Greenland, US Bases and Missile Defence*.
- CNR. (2020). *Not for Sale: Trump, Greenland and Danish Naval Diplomacy*.

- CRS. (2026). *CRS INSIGHT Prepared for Members and Committees of Congress*. <https://crsreports.congress.gov>
- Cull, N. John., & Sadlier, D. J. (2009). *Public diplomacy: lessons from the past*. Figueroa Press.
- Eprs. (2025). *Greenland: Caught in the Arctic geopolitical contest*.
- Gao, F., & Guo, P. (2025). Unique risks and evolving trends in Arctic governance: a forward-looking analysis based on policies and practices. *European Journal of Futures Research*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s40309-025-00250-y>
- Greaves, W. (2017). *Soft Securitization: Unconventional Security Issues and the Arctic Council*.
- High North News. (2021). *Two United States–Greenland Collaborations Get US State Department Funding*. <https://en.highnorthnews.com/science/two-united-statesgreenland-collaborations-get-us-state-department-funding/115699>
- Jacob, G. (2021). *In Arctic push, US extends new economic aid package to Greenland*. <https://www.reuters.com/world/europe/arctic-push-us-extends-new-economic-aid-package-greenland-2021-09-15/>
- Jacobsen, M., Wæver, O., & Gad, U. P. (2024). Greenland in Arctic security: (De)securitization dynamics under climatic thaw and geopolitical freeze. In *Greenland in Arctic Security: (De)securitization Dynamics under Climatic Thaw and Geopolitical Freeze*. University of Michigan Press. <https://doi.org/10.3998/mpub.12676130>
- James, B. (2017). *The Purchase of the Danish West Indies by the United States of America*.
- Jan, R. C. (2019). *Greenland and the International Politics of a Changing Arctic*.
- Janice, C. (2023). *Dividing the Northern World: The Arctic and the Alaska Purchase*.
- Ken, O. (2024). *Department of Defense Releases 2024 Arctic Strategy*. Department of Defense Releases 2024 Arctic Strategy
- Kristian, F. (1993). *The Modernization of the US Radar Installation at Thule, Greenland*.
- Mabbett, D. (2025). Buying Greenland. In *Political Quarterly* (Vol. 96, Number 1, pp. 5–7). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.13507>
- Marc. J. (2023). *Greenland in Arctic Security*.

- Maxime. G. (2013). *Joseph Nye on Soft Power Written by Maxime Gomichon*.  
<https://www.e-ir.info/2013/03/08/joseph-nye-on-soft-power/>
- Middleton, A. (2024). *Nothing About Us Without Us” -Rhetorical Analysis of Greenland’s Arctic Policy*. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/paradigmaiiad>
- Mitton, C. (2017). *The Qualitative Descriptive Approach in International Comparative Studies: Using Online Qualitative Surveys*.  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6186482/>
- Nye, J. S. (1990). *China and Globalization Soft Power and Great-Power Competition Shifting Sands in the Balance of Power Between the United States and China*.
- Nye, J. S. (2011). *Soft Power the Means to Success in World Politics*.
- Ogawa, M., Kusaka, R., Sugiyama, S., & Mitani, Y. (2025). The situation of Inuit communities in northwest Greenland (Kalaallit Nunaat) amid continuously changing environmental and social conditions. *Polar Science*, 101257.  
<https://doi.org/10.1016/j.polar.2025.101257>
- OIES. (2025). *Chinese involvement in mining in the Arctic: increasing or declining?* <https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/>
- Osd. (2024). *2024 Department of Defense Arctic Strategy*.
- Patrick, W. (2007). *The Louisiana Purchase and American Expansion, 1803–1898*.
- Politico. (2025). *85 percent of Greenlanders don’t want Trump takeover, new poll says*. <https://www.politico.eu/article/greenland-poll-mute-egede-donald-trump-takeover-united-states/>
- Pram, U., & Kjaergaard, R. (2024). *Greenland in Arctic Security: (De)securitization Dynamics under Climatic Thaw and Geopolitical Freeze*. 227–252. <https://doi.org/10.3998/mpub.12676130.12>
- PS. (2026). *The Greenland Gambit: Exposing the Rot of US Neo-Imperialism*.  
<https://policystability.com/post/2026-01/the-greenland-gambit-exposing-the-rot-of-us-neo-imperialism/>
- RCI. (2026). *The U.S. already has leverage in Greenland, so why is Trump escalating? Experts weigh in*. <https://ici.radio-canada.ca/rci/en/news/2221359/the-u-s-already-has-leverage-in-greenland-so-why-is-trump-escalating-experts-weigh-in>
- Reuters. (2019). *Greenland tells Trump it is open for business but not for sale*.
- Reuters. (2026). *US, Europe fall behind in the race to control the Arctic*.  
<https://www.reuters.com/markets/commodities/us-europe-fall-behind-race-control-arctic-vladimirov-petrova-2026-01-29/>

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- SOF. (2026a). *Greenland: Diplomatic and Defense Agreements with Denmark*. <https://sof.news/defense/us-agreements-with-denmark/>
- SOF. (2026b). *Strategic Importance of Greenland*. <https://sof.news/defense/strategic-importance-of-greenland/>
- Sørensen, K. (2007). *Denmark-Greenland in the twentieth century*. [www.mtp.dk](http://www.mtp.dk)
- Stæger, F. F., Andersen, M. K., Li, Z., Hjerresen, J. P., He, S., Santander, C. G., Jensen, R. T., Rex, K. F., Thuesen, A. C. B., Hanghøj, K., Seiding, I. H., Jørsboe, E., Stinson, S. E., Rasmussen, M. S., Balboa, R. F., Larsen, C. V. L., Bjerregaard, P., Schubert, M., Meisner, J., ... Albrechtsen, A. (2025). Genetic architecture in Greenland is shaped by demography, structure and selection. *Nature*, 639(8054), 404–410. <https://doi.org/10.1038/s41586-024-08516-4>
- Statistic, D. (2025). *Extensive Danish Trade and Investment Relations with the United States*. <https://www.dst.dk/en/Statistik/udgivelser/analyser/55557-extensive-danish-trade-and-investment-relations-with-the-united-states>
- The Artic Six. (2025). *Strengthening Indigenous Digital Storytelling in the Arctic*. <https://www.arcticsix.org/arctic-six/news/news-archive/2025-12-04-strengthening-indigenous-digital-storytelling-in-the-arctic>
- The Polar Connection. (2021). *Setting up a U.S. Consulate in Greenland, Again*. <https://polarconnection.org/us-consulate-greenland-sung-choi/>
- Titilayo Aishat Otukoya. (2024). The securitization theory. *International Journal of Science and Research Archive*, 11(1), 1747–1755. <https://doi.org/10.30574/ijrsra.2024.11.1.0225>
- USGS. (2009). *Assessment of undiscovered oil and gas in the arctic*. <https://www.usgs.gov/publications/assessment-undiscovered-oil-and-gas-arctic>
- Visual Capitalist. (2026a). *How Greenland's Rare Earth Reserves Compare to the Rest of the World*. <https://www.visualcapitalist.com/how-greenlands-rare-earth-reserves-compare-to-the-rest-of-the-world/>
- Visual Capitalist. (2026b). *Mapped: How Arctic Ice Loss Is Reshaping Global Shipping*. <https://www.visualcapitalist.com/how-arctic-ice-loss-is-reshaping-global-shipping/>
- Volquardsen. (2023). *Greenland History and Society*.
- Wilfrid Greaves, & Daniel Pomerants. (2017). *'Soft Securitization': Unconventional Security Issues and the Arctic Council*.